

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adriaan W Bedner, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Bernadus Wibowo, Caritas Woro Murdiati, *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan dan Menyelamatkan Lingkungan: Telaah Kritis Etika Ekofeminis Vandana Shifa*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice*, Routledge, London, 2005
- Brian Z Tamanaha. *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*, Oxford, Clarendon Press. 1997.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jembatan, Jakarta, 2005.
- Budi Winarno, *Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008.
- C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, STPN Press, Yogyakarta, 2019.
- Dr. Asep Karsidi, *Kebijakan Satu Peta*, Sains Press, Jawa Barat, 2016.
- Dr. UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Refika, Bandung, 2020.
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional*, UGM Press, Yogyakarta, 1994.

James A. Caporaso, *Theories of Political Economy*, Cambridge University, Inggris, 1992.

Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas UUD Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

John Scott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Joseph E. Stiglitz, *Berkelit Dari Kutukan Sumber Daya Alam*, Terjemahan The Samdhana Institute, Colombia University Press, 2007

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.

Mansour Fakih, *Landreform Di Desa*, Read Book, Yogyakarta, 2003

Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah. 2014.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001.

Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Moh. Fadli, Muklish, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016.

N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.

Nanang Martono. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.

Oekan S. Abdoellah, Ph.D., *Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Oloan Sitorus, *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional*, STPN Press, Yogyakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cetakan Ke-11, Kencana, Jakarta, 2011.

R Banakar, dan M Travers. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford Hart Publishing, 2005.

Ronald Dworkin, *Taking Right Seriously*, Harvard University Press, Cambridge, 1978.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sulistiyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Tody Sasmitha, Haryo Budhiawan, dkk, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 58/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010)*, STPN Press, Yogyakarta, 2014.

Usep Setiawan, *Kembali ke Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2010.

Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, Penerbit Widina, Bandung, 2022

Wheeler dan Thomas, “Socio-Legal Studies”. DJ Hayton, (ed), *Law’s Future(s)*.
Oxford, Hart Publishing. 2002.

JURNAL

Abdul Wahid, Rohadi, Disharmonisasi Kebijakan Politik Hukum Agraria: Analisis Hak Pengelolaan Tanah Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jatijajar Law review*, Vol. 3 Nomor 1 April, 2024.

Ana Silviana, Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi dan Implementasi, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, November, 2017.

Andi Bustamin Daeng Kunu, *Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No 1, Januari, 2012.

Andri G. Wibisana, *Keadilan Dalam Satu Intra Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan*, *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 2, 2017.

Bernadus Wibowo, Caritas Woro Murdiati, *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan dan Menyelamatkan Lingkungan: Telaah Kritis Etika Ekofeminis* Vandana Shifa, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019.

Brian Z. Tamanaha. “Socio-Legal Positivism and a General Jurisprudence”. *Oxford Journal of Legal Studies*, Spring, 2001. Vol. 21, No. 1.

Destaria Verani Soe’oed, Analisis Kebijakan Ekstraktivisme Sumber Daya Alam: Studi Kasus Freeport dan Ketimpangan Ekonomi Di Papua, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan* Vol. 12 Nomor 3, Oktober, 2024.

Dragana Milicevic, *Review of Existing Land Funds in European Countries*, *Geonauka* Vol. 2 No. 1, 2014.

Hari Candra dan Afriva Khaidir, Peluang dan Tantangan Bank Tanah Menuju Pemukiman Berwawasan Lingkungan di Indonesia, *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 5, 2020.

Hertha Frederika Septory, Konflik Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan Pesisir Tinjauan Hukum Kehutanan, *MMH Jilid 43 No. 3*, 2014.

Iga Gangga Santi Dewi, dkk, Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, *Prograsif, Jurnal Hukum*, Volume XVII No. 2, Desember, 2023.

John H. Knox, *Climate Changes and Human Rights Law*, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 50 No.1, 2009.

Laksmi Gondokusumo Siregar, *Filsafat Lingkungan Paradigma Baru Untuk Para Arsitek*, *Jurnal Bumi Lestari* Volume 10, No. 1, Februari, 2010.

Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusoff, *Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik*, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 21 No. 2, 2010.

Luthfi Widagdo Eddyono, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3, 2010.

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Moh. Ahza Ali Musthofa, *Politik Hukum Pembentukan Bank Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1 Nomor 1, 2022.

Mirawati Abd. Kadir, Husen Alting, Rusdin Alaudin, Kedudukan Bank Tanah Dalam Rangka Retribusi Tanah, *Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 32, Nomor 1, 2024.

Rizkia Diffa, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate

Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice, Litra: Jurnal Hukum

Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, No. 1, 2022.

Shantika Dwi Kartika, Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja, Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap

Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, Nomor 20/II/Puslit/Oktober/2020, Jakarta,

2020.

Sri Nur Hari Susanto, Metode Perolehan dan Batas-batas Wewenang Pemerintahan,

Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3 No. 3, 2020

Urip Santoso, *Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional*, Mimbar

Hukum Vol. 24 No. 2, 2022.

Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah,

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas

Jenderal Soedirman, 2012.

Wahyu Bening dan Ilham Dwi Rafiqi, Permasalahan Hukum Pengaturan Bank

Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Jurnal Suara Hukum Volume 4, Nomor 2, September 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan
Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang
Lingkungan Hidup.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Perihal Perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI 1945.

DESERTASI

Julius Sembiring, *Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara Dalam Sistem
Hukum Tanah Nasional*, Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
2016.

TESIS

Herlambang Perdana Wiratraman. *Good Governance and Legal Reform in
Indonesia*. A Thesis in Faculty of Graduate Studies Mahidol University.
2006.

SUMBER INTERNET

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th XXVI*, 17 Juli 2023,
[https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-
di-indonesia-maret-2023.html](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html), diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Bivitri Susanti, *3 Indikator 'Autocratic Legalism' Dalam Kebijakan Negara*, 2021,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism->

[dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee/](https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee/), diakses pada tanggal 20 September 2024.

BPK Jambi, https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/12/CB_Aset-Pemkab-Sarolangun-belum-Bersertifikat.pdf, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menguasai>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

Minnie Rivai, Tora Masuk Kuasa Badan Bank Tanah, Warga Sigi Menolak Keluhkan Kepastian Hak Lahan, <https://mongabay.co.id/2024/03/13/tora-masuk-kuasa-bank-tanah-warga-sigi-menolak-keluhkan-kepastian-hak-lahan/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025.

Yogi Eka Sahputra, *Catatan Awal Tahun: Persoalan Penegakan Lingkungan Hidup*, <https://www.mongabay.co.id/2022/01/10/catatan-awal-tahun-berbagai-persoalan-dalam-penegakan-hukum-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 30 September 2024.

Windy Wulan Sari, dkk, Kedudukan Hukum Badan Bank Tanah Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria, <https://repository.untag-sby.ac.id/14939/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

HASIL WAWANCARA

“Hasil wawancara Bersama Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si, Kepala Divisi Perolehan Tanah Badan Bank Tanah pada 10 Maret 2025”, n.d.